

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang mencakup wawancara dengan Joni Aswira selaku produser film *Dirty Vote*, serta analisis terhadap representasi politisasi birokrasi dalam konteks Pilpres 2024 yang diangkat dalam film tersebut, ditambah dengan penelaahan terhadap tanggapan penonton, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis teks terhadap film *Dirty Vote*, dapat disimpulkan bahwa representasi praktik politisasi birokrasi pada Pemilu 2024 secara dominan dibangun melalui figur Presiden Joko Widodo sebagai aktor sentral. Film ini menampilkan narasi yang kuat mengenai keterlibatan aktif presiden dalam proses politik elektoral, baik melalui simbol visual, penggalan pidato, maupun montase pertemuan politik.

Praktik politisasi birokrasi direpresentasikan dalam bentuk penggunaan instrumen kekuasaan negara untuk mendukung agenda politik tertentu, seperti yang tergambar dalam narasi tentang politik gentong babi. Relasi kuasa antara negara dan rakyat ditampilkan dalam posisi timpang, di mana kekuasaan negara dimobilisasi demi kepentingan elektoral kelompok tertentu. Dengan demikian, *Dirty Vote* menghadirkan wacana tandingan yang mempertanyakan netralitas birokrasi serta mengkritisi etika demokrasi dalam konteks Pemilu 2024.

2. Pada tataran produksi wacana, disimpulkan bahwa proses produksi dan konsumsi film ini berlangsung dalam ruang diskursif yang tidak netral, melainkan dibentuk oleh latar belakang, nilai-nilai, dan afiliasi ideologis dari para kreatornya. Keterlibatan tokoh-tokoh seperti Feri Amsari, Dandhy Dwi Laksono, dan Joni Aswira Putra, yang memiliki rekam jejak panjang dalam dunia hukum, jurnalisme, dan advokasi

demokrasi, menunjukkan bahwa produksi film ini merupakan tindakan politis yang disengaja. Praktik ini sekaligus menantang struktur dominan dalam industri media arus utama yang kerap tunduk pada kekuasaan modal dan negara.

Lebih jauh, strategi distribusi independen melalui kanal digital yang tidak terafiliasi dengan lembaga penyiaran besar memperlihatkan adanya upaya sadar untuk menjaga kemandirian wacana serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi alternatif. Tindakan ini mencerminkan praktik wacana kritis yang tidak hanya mereproduksi makna dominan, tetapi juga berupaya menciptakan ruang perlawanan terhadap hegemoni ideologis dalam konteks politik elektoral Indonesia. Dengan demikian, *Dirty Vote* tidak hanya hadir sebagai teks visual semata, tetapi juga sebagai produk dari praktik wacana yang politis, ideologis, dan strategis. Film ini menjadi representasi konkret dari bagaimana produksi teks dalam media dapat digunakan sebagai alat intervensi sosial untuk membangun kesadaran publik serta memperluas partisipasi masyarakat dalam menafsirkan dan mengkritisi dinamika demokrasi di Indonesia.

3. Pada dimensi praktik sosial – budaya, hasil penelitian berdasarkan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough dan teori hegemoni Antonio Gramsci, ditemukan bahwa praktik sosial dalam film ini berkaitan erat dengan corak ekonomi kapitalistik, ketimpangan kekayaan, serta pengaruh modal dalam pembiayaan kampanye. Struktur ini memperkuat aliansi antara elite politik dan elite ekonomi dalam mempertahankan kekuasaan, yang digambarkan dalam *Dirty Vote* sebagai bentuk dominasi yang disamarkan oleh prosedur demokrasi formal.

Dengan demikian, *Dirty Vote* tidak sekadar menjadi kritik sinematik, tetapi juga membentuk ruang diskursif bagi resistensi politik dan kesadaran publik. Wacana yang dibangun film ini mampu

menantang narasi dominan dan berkontribusi dalam membongkar hegemoni kekuasaan yang terlembaga dalam sistem politik Indonesia.

B. Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, praktik media, serta kesadaran masyarakat dalam konteks demokrasi dan politik elektoral di Indonesia.

1. Implikasi Teori

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis wacana kritis (AWK) model Norman Fairclough sangat relevan untuk membedah konten media populer seperti film dokumenter. Selain itu, teori hegemoni Gramsci juga terbukti efektif dalam menjelaskan bagaimana kekuasaan dan ideologi bekerja dalam praktik politisasi birokrasi yang direpresentasikan di film *Dirty Vote*. Hal ini membuka ruang bagi kajian ilmu komunikasi, sociolinguistik, dan ilmu politik untuk lebih aktif mengeksplorasi media visual sebagai teks yang sarat muatan ideologis dan simbolik.

2. Implikasi Praktis bagi Pembuat Media dan Aktivis

Temuan dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa produksi media independen, seperti film dokumenter *Dirty Vote*, mampu menjadi alat produksi wacana tandingan terhadap dominasi kekuasaan simbolik negara. Ini bisa menjadi inspirasi dan rujukan bagi para pembuat film, jurnalis, dan aktivis media lainnya bahwa produksi konten bukan hanya soal penyajian fakta, tapi juga strategi diskursif yang berdaya untuk menciptakan perubahan kesadaran publik.

3. Implikasi Sosial dan Politik

Penelitian ini memperlihatkan bahwa media seperti *Dirty Vote* tidak hanya membentuk opini, tetapi juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam menafsirkan ulang realitas politik. Dengan demikian, masyarakat sebagai konsumen media juga memiliki potensi besar sebagai aktor diskursif yang aktif. Implikasinya, pendidikan politik dan literasi media sangat dibutuhkan agar publik mampu menilai informasi

secara kritis dan tidak mudah terjebak dalam narasi dominan yang manipulatif.

4. Implikasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan studi lanjutan, misalnya dengan mengeksplorasi bagaimana publik merespons wacana yang dibangun dalam *Dirty Vote* melalui media sosial, atau membandingkan representasi politisasi birokrasi dalam berbagai jenis media seperti berita televisi, koran digital, atau konten YouTube lainnya. Kajian kuantitatif juga dapat dilakukan untuk mengukur sejauh mana pengaruh film ini terhadap persepsi politik masyarakat.

C. Saran

Basarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai representasi praktik politisasi birokrasi dalam film *Dirty Vote*, maka peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu

Diharapkan agar pemerintah, khususnya lembaga-lembaga negara dan birokrasi, dapat menjaga prinsip netralitas dan integritas dalam pelaksanaan pemilu. Temuan dalam film *Dirty Vote* seharusnya menjadi bahan refleksi untuk memperkuat sistem demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan.

2. Bagi Masyarakat dan Pemilih

Masyarakat perlu meningkatkan literasi politik serta kemampuan kritis dalam menyikapi berbagai narasi politik yang berkembang, termasuk melalui media film. Film *Dirty Vote* dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran untuk memahami bagaimana kekuasaan dapat membentuk opini publik dan memengaruhi jalannya demokrasi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pemilu yang bersih.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian selanjutnya yang mengangkat isu representasi politik, analisis media, dan studi demokrasi di Indonesia. Pendekatan analisis wacana kritis terbukti mampu mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi dalam teks visual seperti film dokumenter. Peneliti berikutnya dapat mengembangkan pendekatan ini dengan objek yang lebih luas dan kerangka teori yang lebih kompleks misalnya dengan mengombinasikan pendekatan kultural atau semiotik.

4. Bagi Pembuat Film dan Konten Edukatif

Film *Dirty Vote* menjadi contoh bagaimana karya dokumenter dapat berfungsi sebagai alat edukasi politik dan advokasi sosial. Para pembuat film diharapkan terus menghadirkan karya-karya kritis yang berpihak pada kebenaran dan mendorong kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu kebijakan publik, etika kekuasaan, dan demokrasi.